

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DAN KINERJA EKONOMI DI WILAYAH BALI TIMUR

Ni Komang Widya Anggaraini¹
I Made Suyana Utama²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: widyaanggaraini@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pengalokasian anggaran, jumlah anggaran untuk setiap daerah berbeda-beda tergantung pada potensi keuangan daerah tersebut. Terciptanya potensi keuangan daerah yang optimal dan disertai dengan pengelolaan daerah yang efektif dan efisien, maka kinerja perekonomian daerah dapat ditingkatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Ekonomi di Wilayah Bali Timur dengan menggunakan data sekunder tahun 2008-2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur/*Path Analisis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa. 1) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. 2) Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi. 3) Pendapatan asli daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja ekonomi melalui belanja modal. Belanja modal tidak berhasil memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja ekonomi.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Ekonomi*

ABSTRACT

In the budget allocation, the budget amount for each region varies depending on the financial potential of the area. The creation of optimal regional financial potential and accompanied by effective and efficient regional management, the regional economic performance can be improved optimally. This study aims to determine the effect of Original Regional Income and Balancing Funds on Capital Expenditures and Economic Performance in Eastern Bali by using secondary data for 2008-2016. Analytical technique used in this research is path analysis / Path Analisis. The results of the analysis show that. 1) Original regional income and equity funds have a positive and significant impact on capital expenditure. 2) Original regional income, equity funds and capital expenditures have a positive and significant impact on economic performance. 3) Indigenous revenues have an indirect effect on economic performance through capital expenditures. Capital expenditures do not succeed in mediating the effect of balancing funds on economic performance.

Keywords: *Local Original Income, Balancing Fund, Capital Expenditure, Economic Performance*

PENDAHULUAN

Ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menyebabkan semakin luas pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah”. Meskipun diundangkannya pembagian pendapatan untuk pendapatan dari sumber daya, UU tersebut tidak memberikan pemerintah daerah instrumen pajak lokal yang baru untuk dikuasai secara lokal atau otoritas peminjam yang independen dari pemerintah pusat. Ini berarti bahwa tidak ada ketentuan yang dibuat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan sumber daya yang signifikan dan bahwa pemerintah pusat tidak mempertimbangkan pajak baru yang besar bagi pemerintah daerah (Alm *et al.*, 2001). Pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian besar fungsi dan sumber daya kepada pemerintah kabupaten dan kota bukan provinsi (Fitriani, *et al.*, 2005). Desentralisasi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan potensi untuk mengurangi kemiskinan (Miranti *et al.*, 2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapat dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indrajati dan Jaka, 2011). Pemerintah daerah secara finansial harus independen terhadap pemerintah pusat yakni dengan cara menggali sebanyak-banyaknya sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah terdiri dari: tanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban

keuangan, kejujuran, hasil guna dan dana guna, pengendalian (Hutaluju, dkk., 2011). Keberhasilan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah seharusnya harus diimbangi oleh peningkatan kinerja ekonomi daerah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Pengambilan keputusan oleh pemerintah lokal akan lebih didengar dalam memenuhi pilihan lokal yang beranekaragam sehingga lebih berguna bagi efisiensi alokasi (Fajri, dkk., 2015). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi adalah tujuan setiap daerah, dimana PAD yang tinggi mencerminkan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik (Arini dan Dwi Setyadhi, 2014).

Kinerja yang difokuskan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, indikator yang bersifat makro (umum) yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang digunakan sebagai ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan. Indikator makro tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan disetiap negara dapat dilihat dari pendapatan nasional atau PDB, sedangkan untuk daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB sebagai salah satu indikatornya. Pendapatan nasional sangat diperhatikan disetiap negara di dunia. Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan (Aprilia, 2015).

Pendapatan daerah yakni dana perimbangan juga dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dengan

peningkatan tersebut akan mencerminkan kinerja ekonomi pada suatu daerah semakin baik. Jika PAD berpengaruh terhadap kinerja, maka terdapat kemungkinan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Hal ini karena nilai dana perimbangan pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD serta indikator tersebut juga dapat berpengaruh terhadap belanja daerah. Belanja daerah adalah belanja yang tercantum pada APBD yang diarahkan agar dapat mendorong pembangunan daerah dengan penyelenggaraan pemerintah.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kategori yakni belanja langsung dan belanja tak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang penggunaan dananya dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan belanja tak langsung merupakan belanja yang digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintah daerah. Belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur adalah sebuah bentuk investasi. Investasi yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga bertujuan untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat (Kusuma, 2016). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan suatu proses yang sarat akan kepentingan-kepentingan politisi, sehingga anggaran yang sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tetapi adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di

masyarakat (Prami dan Arka, 2016). Menurut Felix (2012) pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Tabel 1 Belanja Modal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2016 (dalam juta rupiah)

Kabupaten/Kot a	201 1	201 2	201 3	2014	2015	2016
Jembrana	67	134	142	161	185	324
Tabanan	70	138	128	136	112	257
Badung	199	627	776	949	922	1.19 5
Gianyar	124	120	185	201	224	309
Klungkung	49	81	64	99	119	144
Bangli	101	82	62	70	110	250
Karangasem	118	171	180	177	178	190
Buleleng	121	79	185	183	226	345
Denpasar	88	206	254	234	192	257
Provinsi Bali	67	134	142	2.21 3	2.27 2	3.27 4

Sumber: *BPS Provinsi Bali, 2017*

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali yakni sebesar 3.274 juta rupiah. Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, tiga kabupaten di Wilayah Bali Timur merupakan kabupaten yang termasuk rendah belanja modalnya selama tahun 2011-2016. Desentralisasi struktur fiskal suatu negara merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Malik *et al.*, 2006).

Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata yang akan memberikan *multiplier effect* kepada sektor lainnya. Kinerja ekonomi Provinsi Bali dipengaruhi

oleh kinerja ekonomi dari masing-masing kabupaten/kota yang terdiri dari 9 kabupaten/kota yang tercermin dari PDRB per kapita. Pada Tabel 2 menunjukkan PDRB per kapita di Provinsi Bali enam tahun terakhir yakni tahun 2008-2016, dimana Wilayah Bali Timur yakni Kabupaten Karangasem dengan PDRB per kapita rata-rata sebesar 25.284 ribu rupiah, Kabupaten Klungkung dengan rata-rata sebesar 30.989 ribu rupiah, dan Kabupaten Bangli rata-rata sebesar 31.538 ribu rupiah, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya seperti.

Table 2 PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Jembrana	23.810	26.194	28.991	33.431	37.825	41.360	31.935
Tabanan	24.355	26.812	30.114	34.770	39.465	42.805	33.053
Badung	41.912	47.305	53.972	61.495	66.974	73.251	57.485
Gianyar	25.475	28.272	31.620	36.510	40.502	44.470	34.475
Klungkung	23.064	25.435	28.176	32.473	36.496	40.292	30.989
Bangli	14.021	15.375	17.179	19.799	22.418	24.743	31.538
Karangasem	18.608	20.466	22.985	26.525	30.104	33.017	25.284
Buleleng	24.100	26.686	29.992	34.779	39.448	43.176	33.030
Denpasar	27.949	31.148	34.730	39.613	43.679	47.632	37.458
Provinsi Bali	26.433	29.443	33.135	38.096	42.663	46.517	36.048

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2017

Kabupaten yang berada di Wilayah Bali Timur yakni Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli merupakan kabupaten

yang memiliki tingkat PDRB per kapita dan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah juga paling rendah dibandingkan kabupaten/kota yang ada di Bali. Kenaikan dan penurunan kinerja ekonomi daerah ditentukan pula oleh pengeluaran pemerintah. Peningkatan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang juga merupakan indikator yang mempengaruhi kinerja ekonomi suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mengenai bagaimana pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan kinerja ekonomi di Wilayah Bali Timur.

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari suatu masalah yang masih perlu diuji kebenarannya (Rahyuda, dkk., 2004). Berdasarkan uraian pokok permasalahan dan landasan teori, maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal di Wilayah Bali Timur.
- 2) Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi di Wilayah Bali Timur.
- 3) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi melalui belanja modal di Wilayah Bali Timur.

METODOLOGI

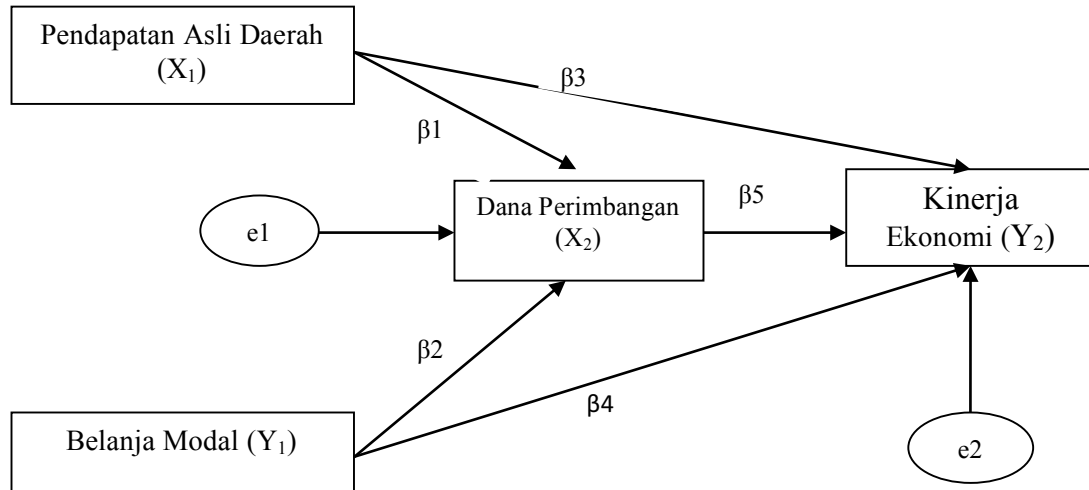
Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbentuk asosiatif. Penelitian ini menggunakan variabel pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2), belanja modal (Y_1), dan kinerja ekonomi (Y_2) di Wilayah Bali Timur. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Bali Timur, pemilihan lokasi ini didasari karena kabupaten-kabupaten yang berada di Wilayah Bali Timur yakni Kabupaten

Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem merupakan tiga kabupaten yang PDRB per kapita dan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah termasuk jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) *Variable dependent* atau sering disebut variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Penelitian ini menggunakan kinerja ekonomi sebagai variabel terikat.
- 2) *Variable independent* atau sering disebut variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependent*). Penelitian ini menggunakan pendapatan asli daerah, dana perimbangan sebagai variabel bebas.
- 3) *Variable intervening* adalah variabel yang memiliki fungsi ganda yaitu dapat berfungsi sebagai variabel bebas dan disisi lain dapat berfungsi sebagai variabel terikat. Variable intervening pada penelitian ini adalah belanja modal.

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, serta Kabupaten Bangli. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi non-prilaku yaitu pengumpulan data – data yang berasal dari dokumen – dokumen yang berhubungan dengan rumusan masalah yakni pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan kinerja ekonomi di Wilayah Bali Timur. Sehingga akan diperoleh data yang relevan untuk dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur dengan menggunakan program SPSS. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur (*path analysis*) merupakan perluasan dari analisis regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Suyana Utama, 2012:156). Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan langsung *variable independent* terhadap *variable dependent* dan hubungan yang tidak langsung melalui *variable intervening* dengan diagram hubungan antar variabel seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 1 Metode Analisis Jalur Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Ekonomi

Dari konsep di atas dapat dilihat anak panah β_1 menunjukkan pengaruh secara langsung dari variabel X_1 terhadap variabel Y_1 . Anak panah β_2 menunjukkan pengaruh secara langsung dari variabel X_2 terhadap variabel Y_1 . Anak panah β_3

menunjukkan pengaruh secara langsung dari variabel X_1 terhadap variabel Y_2 . Anak panah β_4 menunjukkan pengaruh secara langsung dari variabel X_2 terhadap variabel Y_2 . Anak panah β_5 menunjukkan pengaruh secara langsung variabel Y_1 terhadap Y_2 . Koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan regresi yakni menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Dalam hal ini dua persamaan struktural yakni:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

- Y_1 = Belanja Modal
- Y_2 = Kinerja Ekonomi
- X_1 = Pendapatan Asli Daerah
- X_2 = Dana Perimbangan
- e_1, e_2 = Variabel Pengganggu
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Jalur
- standard koefisien pada persamaan (1) akan memberikan nilai b_1, b_2
- standard koefisien pada persamaan (2) akan memberikan nilai $b_3, b_4, \text{ dan } b_5$.
- Nilai kekeliruan taksiran standard (*strandard error of estimate*) yakni :

$$e_i = \sqrt{(1 - R^2)} \dots\dots\dots (3)$$

Total keraguan yang dapat dijelaskan oleh model, diukur dengan:

$$R_m^2 = 1 - (e_1^2 \cdot e_2^2 \dots e_p^2) \dots\dots\dots (4)$$

Dalam hal ini interpretasi terhadap R_m^2 sama dengan interpretasi koefisien determinasi (R^2) pada analisis regresi e_i yang merupakan *standard of error estimate* dari model regresi. Uji validitas koefisien jalur pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan analisis regresi, menggunakan nilai p dari uji t, yaitu pengujian koefisien regresi variabel yang dibakukan secara parsial. Berdasarkan

teori training, maka jalur-jalur yang non signifikan dibuang sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empiris

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Deskripsi Variabel Penelitian

1) Pendapatan Asli Daerah

Bali merupakan daerah yang pendapatan daerahnya sebagian besar berasal dari sektor pariwisata sehingga menjadikan beberapa kabupaten di Bali memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi atau lebih tinggi dibandingkan daerah yang mengandalkan pendapatan selain sektor pariwisata. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan rutin pemerintah Provinsi Bali (BPS Provinsi Bali, 2016). Menurut Suparmoko (2002:55) pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Tabel 3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Kapita Tahun 2008-2016 (dalam juta rupiah)

Tahun	Kabupaten			Rata-rata Per Kabupaten	Provinsi Bali
	Bangli	Klungkung	Karangasem		
2008	59.980	173.824	110.555	114.786	283.080
2009	76.665	174.952	121.692	124.437	305.599
2010	75.595	184.302	158.324	139.407	358.216
2011	105.812	236.836	323.890	222.180	435.569
2012	186.931	282.334	358.258	275.841	509.605
2013	254.484	389.606	417.457	353.849	623.715
2014	344.531	568.033	589.717	500.760	711.446
2015	395.185	685.920	595.897	559.001	732.341
2016	470.087	762.171	775.814	669.357	724.077
Rata-rata Per Tahun	218.808	384.220	383.512	328.847	520.405

Sumber: *BPS Bali, 2017*

Pada Tabel 4.1 menunjukkan rata-rata PAD di Wilayah Bali Timur dalam sembilan tahun terakhir termasuk rendah, dimana Kabupaten Bangli memiliki rata-rata PAD sebesar 218.808 juta rupiah. Kabupaten Klungkung dengan rata-rata sebesar 384.220 juta rupiah, sedangkan Kabupaten Karangasem sebesar 383.512 juta rupiah. Hal ini dikarenakan potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah berbeda.

2) Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan *APBN* yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Tabel 4 Dana Perimbangan Per Kapita Wilayah Bali Timur Tahun 2008-2016 (dalam juta rupiah)

Tahun	Kabupaten			Rata-rata Per Kabupaten	Provinsi Bali
	Bangli	Klungkung	Karangasem		
2008	1.546	2.043	3.893	2.494	1.546
2009	1.523	2.053	1.115	1.563	1.671
2010	1.608	1.967	1.156	1.577	1.668
2011	1.715	2.086	1.195	1.665	1.782
2012	2.107	2.512	1.438	2.019	2.266
2013	2.331	2.872	1.644	2.282	2.417
2014	2.472	3.062	1.712	2.415	2.481
2015	2.564	3.097	1.731	2.464	2.577
2016	3.374	3.974	2.688	3.345	4.445
Rata-rata Per Tahun	2.138	2.630	1.409	2.059	2.317

Sumber: *data primer diolah, 2017*

Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dana perimbangan per kapita di tiga kabupaten di Wilayah Bali Timur selama sembilan tahun terakhir, Kabupaten Klungkung paling tinggi yakni sebesar 2.630 juta rupiah. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan dana perimbangan yang diterima Provinsi Bali. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten yang paling rendah dana perimbangannya yakni sebesar 2.138 juta rupiah diantara tiga kabupaten di Wilayah Bali Timur. Dana perimbangan per kapita dari ketiga kabupaten, jika dirata-ratakan jauh lebih kecil dari rata-rata dana perimbangan per kapita Provinsi Bali.

3) **Belanja Modal**

UU Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa belanja modal per kapita yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten di Wilayah Bali Timur rata-rata pertahunnya termasuk sangat rendah dalam melakukan belanja modal jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Bali. Kabupaten Klungkung dengan rata-rata pertahun sebesar 480 juta rupiah, di susul Kabupaten Bangli dengan rata-rata pertahun sebesar 453 juta rupiah, dan Kabupaten Karangasem dengan rata-rata pertahun sebesar 402 juta

rupiah. Sedikitnya belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan tidak optimalnya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Tabel 5 Belanja Modal Per Kapita di Wilayah Bali Timur Tahun 2008-2009 (dalam juta rupiah)

Tahun	Kabupaten			Rata-rata Per Kabupaten	Provinsi Bali
	Bangli	Klungkung	Karangasem		
2008	403	380	391	391	327
2009	226	488	360	358	543
2010	319	250	195	254	517
2011	528	284	297	369	573
2012	377	472	426	425	857
2013	285	370	447	367	1,120
2014	317	573	437	442	902
2015	498	681	437	538	1,353
2016	1,122	818	626	855	1,740
Rata-rata Per Tahun	453	480	402	445	881

Sumber: data primer diolah, 2017

4) Kinerja Ekonomi

Kinerja ekonomi daerah dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian dan keberhasilan suatu program dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Indikator kinerja daerah ditetapkan dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator utama yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pembangunan suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat merupakan salah satu sasaran dari pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi daerah akan tercermin pada kenaikan pendapatan per kapita dan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita sebagai indikator makro dalam mengukur keberhasilan kinerja ekonomi

adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit produksi pada suatu wilayah atau daerah dalam periode tertentu tanpa memperhitungkan kepemilikan.

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten di Wilayah Bali Timur yang paling tinggi PDRB per kapitanya yakni sebesar 23.355 ribu rupiah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Wilayah Bali Timur sangat rendah dibandingkan dengan PDRB Provinsi Bali rata-rata per tahun sebesar 26.276 ribu rupiah. Rata-rata PDRB per kapita dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Hal ini mencerminkan bahwa belum optimalnya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 6 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Wilayah Bali Timur Tahun 2008-2016 (dalam ribu rupiah)

Tahun	Kabupaten			Rata-rata Per Tahun	Provinsi Bali
	Bangli	Klungkung	Karangasem		
2008	8.714	12.766	8.167	9.882	13.886
2009	9.926	14.422	9.318	11.222	15.793
2010	10.960	16.115	10.431	12.502	17.208
2011	11.737	17.365	11.454	13.518	18.641
2012	12.961	19.121	12.765	14.949	20.743
2013	14.492	21.149	14.428	16.689	22.934
2014	19.799	32.473	26.525	26.265	38.096
2015	22.418	36.496	30.104	29.672	42.663
2016	24.743	40.291	33.017	32.683	46.517
Rata-rata Per Kabupaten	15.083	23.355	17.357	18.598	26.276

Sumber: data primer diolah, 2017

HASIL PENELITIAN

Pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh antar variabel penelitian dilakukan dengan SPSS, dimana Pengujian struktur pertama yaitu pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Pengujian dilakukan

untuk melihat bagaimana pengaruh PAD dan dana perimbangan secara langsung terhadap belanja modal. Pengujian struktur kedua yaitu pengaruh PAD, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh PAD, dana perimbangan dan belanja modal secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengujian dilakukan dengan SPSS, maka hasil uji regresi disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7 Hasil Pengaruh Antar Variabel Penelitian

Hubungan Variabel	Koefisien Regresi		SE	T	Sig
	Tidak Standar	Standar			
PAD→ BM	.318	.424	.097	3.274	.003
DP→ BM	.116	.539	.028	4.161	.000
PAD→ KE	23.01	.534	2.858	8.051	.000
DP→KE	2.936	.237	.897	3.273	.003
BM→KE	17.108	.297	5.001	3.421	.002

Sumber: Lampiran

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui hubungan antar variabel penelitian, yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan, kedua persamaan struktural tersebut juga dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$Y_1 = 0,424 X_1 + 0,539 X_2$$

$$Y_2 = 0,534 X_1 + 0,237 X_2 + 0,297Y_1$$

Nilai Kekeliruan Taksiran Standar (*Standard Error of Estimate*)

Untuk mengetahui nilai e_1 yang menunjukkan jumlah varian variabel belanja modal (Y_1) yang tidak dijelaskan oleh variabel PAD (X_1) dan dana perimbangan (X_2), dihitung menggunakan rumus:

$$e_1 = \sqrt{1 - R^2}$$

$$= \sqrt{1 - 0,773} = 0,476$$

Untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan jumlah varian variabel kinerja ekonomi (Y_2) yang tidak dijelaskan oleh variabel PAD (X_1), dana perimbangan (X_2), dan belanja modal (Y_1), dihitung menggunakan rumus:

$$e_2 = \sqrt{1 - R^2}$$

$$= \sqrt{1 - 0,961} = 0,197$$

Pemeriksaan Validitas Model

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya yakni:

$$R_m^2 = 1 - (Pe_1)^2 - (Pe_2)^2$$

$$= 1 - (0,476)^2 - (0,197)^2$$

$$= 1 - (0,226) - (0,038) = 0,99$$

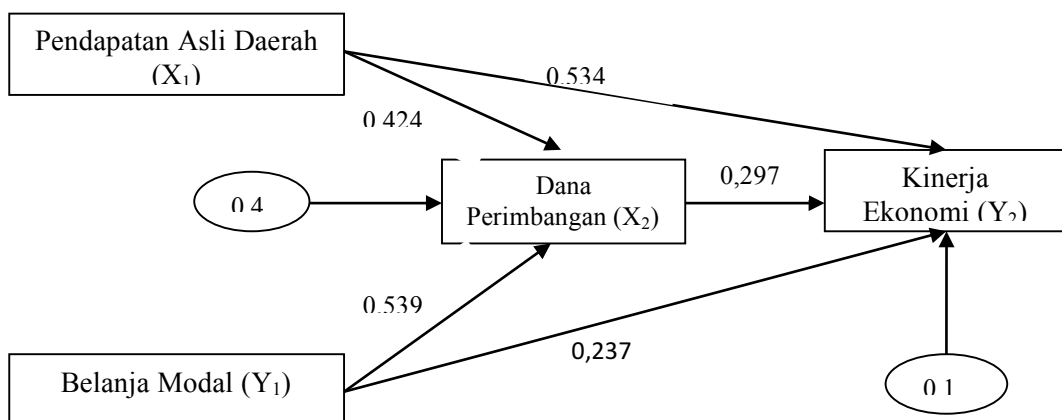
Keterangan:

R_m^2 = Koefisien determinasi total
 e_1, e_2 = Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 99 persen artinya sebesar 99 persen variabel pendapatan asli daerah, variabel dana perimbangan, variabel belanja modal, dan variabel kinerja ekonomi dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Gambar 2 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja modal, yakni pendapatan berpengaruh

terhadap belanja modal sebesar 0,424 sedangkan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 0,539. Hal ini karena pada umumnya transfer yang diterima pemerintah daerah oleh pemerintah pusat lebih besar dari pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, sehingga dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah sebagian besar digunakan untuk membiayai belanja modal daerah.



Gambar 2 Diagram Hasil Analisis Jalur

Pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan dana perimbangan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja ekonomi, dimana pendapatan asli daerah berpengaruh sebesar 0,534 terhadap kinerja ekonomi, sedangkan dana perimbangan berpengaruh sebesar 0,237 terhadap kinerja ekonomi. Pendapatan asli daerah berpengaruh lebih besar terhadap kinerja ekonomi karena pendapatan asli daerah yang tinggi dapat mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang baik, dimana tingkat keberhasilan dan kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya akan dikatakan semakin baik dan ketergantungan pemerintah daerah akan transfer pemerintah berkurang bila pendapatan asli daerah meningkat. Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi sebesar 0,297, dimana belanja modal

merupakan investasi pemerintah daerah yang akan memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dapat menstimulus perekonomian di daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan berdampak pada kinerja ekonomi daerah yang semakin meningkat.

Pembahasan Hasil Analisis Data

1) Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal di Wilayah Bali Timur

Hasil analisis data menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan dalam penelitian ini sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali di daerah tersebut sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat, sehingga dengan peningkatan PAD dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal.

Hubungan positif antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal yang diperoleh dalam penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Panji dan Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, hal ini berarti semakin tinggi PAD maka belanja modal akan meningkat yang mengartikan hubungan positif antara PAD dengan belanja modal. Penelitian oleh Kusnandar dan Siswantoro (2011) menyimpulkan bahwa PAD sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal bahkan pada tingkat keyakinan 99 persen ($\alpha = 0,01$). Meskipun presentase PAD cukup kecil dari total pendapatan yang diterima oleh daerah, tetapi sangat berpengaruh terhadap pengalokasian

belanja modal. PAD yang meningkat, daerah lebih leluasa untuk merencanakan dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur.

2) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Wilayah Bali Timur

Hasil analisis data menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Setiap transfer dana perimbangan yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah.. Hubungan positif antara variabel dana perimbangan terhadap belanja modal yang diperoleh dalam penelitian ini, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Hal ini berarti semakin tinggi dana perimbangan akan meningkatkan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, dengan kata lain dana perimbangan merupakan salah satu indikator penunjang peningkatan belanja daerah.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Edwin (2013) yang memperoleh hasil bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Belanja modal masih memiliki peranan yang dominan dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah, dimana hal ini terlihat dari proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah yang lebih besar dibandingkan proporsi pendapatan asli daerah.

3) Pengaruh PAD terhadap Kinerja Ekonomi di Wilayah Bali Timur.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja ekonomi di Wilayah Bali Timur. Hubungan positif variabel PAD terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh, sesuai dengan teori W.W. Rostow yang menyatakan bahwa pada fase prasyarat lepas landas, masyarakat mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan berdasarkan kekuatan sendiri dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis (Arsyad, 2004).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Grahadika (2017) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali selama tahun 2007-2015, dengan adanya PAD dapat meningkatkan kinerja ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali selama tahun 2007-2015. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pusat akan semakin berkurang, dimana selanjutnya daerah akan lebih leluasa dan lebih fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya.

4) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Ekonomi di Wilayah Bali Timur.

Hasil analisis data menunjukkan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi di Wilayah Bali Timur hal ini karena semakin tinggi transfer dana yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka kinerja ekonomi di daerah tersebut dapat meningkat. Hubungan positif dan signifikan antara variabel dana perimbangan dan kinerja ekonomi dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan digunakan sebagai dana transfer dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Defisit akan terjadi jika realisasi belanja daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah, maka dari itu pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk menutup kekurangan belanja daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat, maka akan semakin besar belanja yang dilakukan, sehingga akan meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

5) Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Ekonomi di Wilayah Bali Timur.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi di Wilayah Bali Timur, dimana peningkatan belanja modal akan meningkatkan kinerja ekonomi. Belanja modal pemerintah daerah memiliki peran yang strategis dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga dapat menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Model Rostow menjelaskan bahwa model belanja langsung pemerintah pada tahap awal perkembangan ekonomi dicirikan dengan besarnya persentase investasi pemerintah terhadap total investasi. Peningkatan belanja modal diharapkan mampu menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2004:214-215).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Guntur (2013) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif. Hal ini berarti bahwa jika

terjadi kenaikan nilai modal maka akan menyebabkan capaian pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Tabel 8 Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, serta Kinerja Ekonomi di Wilayah Bali Timur Tahun 2008-2016

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y1	
$X_1 \longrightarrow Y_1$	0,424		0,424
$X_2 \longrightarrow Y_2$	0,534	0,125	0,659
$X_2 \longrightarrow Y_1$	0,539		0,539
$X_2 \longrightarrow Y_2$	0,237	0,160	0,397
$Y_1 \longrightarrow Y_2$	0,297		0,297

Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung PAD (X_1) terhadap belanja modal (Y_1) adalah sebesar 0,424, tidak terdapat pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut, sehingga pengaruh total sebesar 0,424 yang berarti PAD berpengaruh secara langsung terhadap belanja modal sebesar 42,4 persen. Pengaruh tidak langsung PAD (X_1) terhadap kinerja ekonomi (Y_2) melalui belanja modal (Y_1) adalah sebesar 0,125, ini berarti bahwa PAD berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja ekonomi melalui belanja modal adalah sebesar 12,5 persen. Pengaruh langsung dana perimbangan (X_2) terhadap belanja modal (Y_1) adalah sebesar 0,539, tidak terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel tersebut, sehingga variabel totalnya adalah sebesar 0,539 yang artinya dana perimbangan berpengaruh secara langsung terhadap belanja modal sebesar 53,9 persen.

Pengaruh tidak langsung dana perimbangan (X_2) terhadap kinerja ekonomi (Y_2) melalui belanja modal (Y_1) sebesar 0,160, ini berarti bahwa dana perimbangan

berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja ekonomi melalui belanja modal adalah sebesar 16 persen. Pengaruh langsung belanja modal (Y_1) terhadap kinerja ekonomi (Y_2) adalah sebesar 0,297, tidak terdapat pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut, sehingga pengaruh totalnya 0,297. Ini berarti bahwa belanja modal berpengaruh secara langsung terhadap kinerja ekonomi sebesar 29,7 persen.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yakni pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Wilayah Bali Timur tahun 2008-2016. PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal, dimana bila PAD dan dana perimbangan meningkat maka belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan meningkat.

Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa jika PAD, dana perimbangan, dan belanja modal meningkat, maka terhadap kinerja ekonomi di Wilayah Bali Timur tahun 2008-2016. Kinerja ekonomi di wilayah tersebut meningkat.

Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi dimediasi oleh belanja modal. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ekonomi tanpa dimediasi oleh belanja modal di Wilayah Bali Timur tahun 2008-2016.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, maka dapat diajukan beberapa saran yaitu pemerintah daerah diharapkan agar lebih dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mendanai seluruh program/aktivitas pemerintahan dan ketergantungan kepada transfer dana dari pemerintah pusat berkurang. Pemerintah daerah juga diharapkan agar dapat memaksimalkan pengalokasian dana untuk kepentingan belanja pembangunan (belanja modal) dibandingkan belanja rutin (belanja operasional) dan pengalokasian dana tersebut harus tepat sasaran serta pemerintah daerah harus dapat menekankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan terkait dengan alokasi dana perimbangan agar tepat sasaran. Banyaknya variabel yang dapat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, potensi dan alokasi dana yang dimiliki oleh suatu wilayah berbeda-beda. Penelitian selanjutnya disarankan agar mencari data terbaru yakni tahun 2017 dan objek penelitian diperluas dengan menambah variabel-variabel yang berkaitan dengan kinerja ekonomi serta dengan wilayah yang berbeda. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian daerah lain.

REFERENSI

Alm, James, Robert H. Aten and Roy Bahl. 2001. Can Indonesia Decentralise Successfully? Plan, Problems and Prospects. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.37, No. 1, 2001:83-102

- Aprilia Kesuma, Ni Luh. 2015. Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 8 No. 1*
- Arini. Made Dwi Setyadhi Mustika. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2007-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*.
- Arsyad. Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-4. Cetakan ke-2. Yogyakarta; STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik Karangasem. 2017. *Karangasem Dalam Angka*. Karangasem.
- Badan Pusat Statistik Bali. 2017. *Bali Dalam Angka*. Bali.
- Edwin Kadafhi, Muhammad. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Universitas Widyatama; Bandung
- Fajrii, Muhammad, Arman Delis, dan Yohanes Vyn Amzar. 2015. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 9 No.2*.
- Felix, Olurankinse. 2012. Analysis of the Effectiveness of Capital Expenditure Budgetting in the Local Government System of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*.
- Fitrani,Fitria, Bert Hofman, and Kai Kaiser. 2005. Unity in Diversity? The Creation of new Local Governments in a Decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 41, No. 1, 2005:57:79.
- Grahadika Putra, IG.A. Ngurah Bagus. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Langsung, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Guntur, Hendriwijayanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

- Halomoan Hotaluju, Agustina Sanggrangbano, dan Antonia K. Bonay. 2011. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 5 No.2.
- Hertanto, Indrajati dan Jaka Sriyana. 2011. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 12, No.1, April 2011.
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal*. Universitas Indonesia.
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 9 No. 1.
- Malik, Shahnawaz, Mahmood-ul-hassan and Shahzad Hussain. 2006. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan. Department of Economics, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan.
- Miranti, Riyana, Alan Ducan, and Rebecca Cassells. 2014. Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 50, No. 3, 2014: 461-82.
- Panji Kartika Jaya, I Putu Ngurah dan Dwirandra, A.A.N.B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 7.1 (2014):79-92.
- Prami Saraswati, I. Gusti Ayu Agung dan Sudarsana Arka. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(4): 1292-1316.
- Permatasari, Isti., dan Mildawati, Titik. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(1), hal.1-17.
- Rahyuda, Ketut, I Gusti Murjana Yasa, dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2004. *Metodelogi Penelitian*. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali.

Suyana Utama, Made. 2014. *Ekonometrika*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.